



SOSIALISASI SERTA EDUKASI DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Franciscus Xaverius Wartoyo¹, David Harlingan², Evy Harjono³, Genta Maghribi⁴, Rita Mulyani⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

¹franciscus.wartoyo@uph.edu, ²01053220037@student.uph.edu,
³01053220043@student.uph.edu, ⁴01053220028@student.uph.edu,
⁵01053220023@student.uph.edu

ABSTRAK

Abstrak: Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang vital dalam menjaga kesehatan suatu negara. Dalam konteks ini, perlu memperhatikan kelompok unik, yaitu Warga Binaan Perumahan (WBP) yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. WBP sering menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap informasi, pendidikan, dan partisipasi politik yang diperlukan untuk menjadi pemilih yang terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan politik di kalangan WBP, meningkatkan partisipasi politik mereka, serta pengembangan keterampilan sosial dan hidup yang berguna setelah pembebasan. WBP menjadi lebih percaya diri dalam berperan aktif dalam proses politik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan politik di kalangan WBP, meningkatkan partisipasi politik mereka, serta pengembangan keterampilan sosial dan hidup yang berguna setelah pembebasan. WBP menjadi lebih percaya diri dalam berperan aktif dalam proses politik. Kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam mempersiapkan mental dan meningkatkan partisipasi politik WBP. Meskipun memiliki dampak positif, terdapat tantangan dalam hal sumber daya dan akses teknologi yang perlu diatasi. Dengan pengalokasian sumber daya yang tepat dan solusi kreatif, kegiatan edukasi ini dapat memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi politik dan kualitas demokrasi. Kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan membantu mempersiapkan WBP secara mental dan meningkatkan partisipasi politik mereka, menjaga kesehatan demokrasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Warga Binaan Perumahan; Edukasi.

Abstract: General elections (Pemilu) are one of the vital pillars of democracy in maintaining the health of a nation. In this context, it is important to consider a unique group, namely Incarcerated Citizens (WBP) within correctional institutions. WBP often face limitations in accessing information, education, and political participation necessary to become informed voters and engage in the democratic process. Research results indicate that an increase in political knowledge among WBP enhances their political participation and the development of social and life skills that are useful after their release. WBP become more confident in actively participating in the political process. Research findings also reveal that political education activities within correctional institutions play a crucial role in preparing the mindset and enhancing the political participation of WBP. Despite having a positive impact, there are challenges related to resources and technological access that need to be addressed. With proper resource allocation and creative solutions, these educational activities can play a significant role in strengthening political participation and the quality of democracy. Educational activities within correctional institutions aid in mentally preparing WBP and increasing their political participation, thereby safeguarding the health of democracy and creating a more inclusive and democratic society.

Keywords: General Elections; Incarcerated Citizens; Educational.

**Article History:**

Received : 06-02-2024
Accepted : 30-04-2024
Online : 30-04-2024



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi suatu negara. Ini adalah saat di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan. Pemilu adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya (Pamungkas, 2009). Namun, Pemilu bukan sekadar proses pemilihan semata, melainkan juga merupakan indikator vital dari kesehatan demokrasi suatu negara. Pemilu yang berkualitas menjadi pondasi utama untuk menjaga stabilitas sosial, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi aktif warga negara. Namun, ada satu kelompok dalam masyarakat yang seringkali menghadapi tantangan unik dalam persiapan untuk Pemilu, yaitu Warga Binaan Perasyarakatan (WBP). Mereka yang sedang menjalani masa tahanan atau hukuman penjara sering menghadapi keterbatasan dalam hal akses terhadap informasi, pendidikan, dan partisipasi politik yang diperlukan agar mereka dapat menjadi pemilih yang terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. *“Pancasila democracy, in the sense of democracy that has patterns of implementation in accordance with the reality and ideals contained in this nation’s society, requires more guidance so that it becomes a political culture full of vitality”* (Wartoyo, 2019).

Dalam konteks ini, kegiatan edukasi yang ditujukan kepada WBP di dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya tentang persiapan mental dalam menghadapi Pemilu, menjadi sangat relevan. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan hak dasar WBP sebagai warga negara, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap peran dan tanggung jawab mereka selama menjalani masa hukuman dan ketika mereka kembali ke masyarakat. Jurnal pengabdian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang pentingnya kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan mental WBP dalam menghadapi Pemilu. Kegiatan ini akan menjelaskan bagaimana kegiatan edukasi tersebut dapat memengaruhi persepsi dan kesiapan mental WBP terhadap proses pemilihan umum, serta bagaimana hal ini dapat berdampak positif pada partisipasi politik mereka di masa mendatang. Selain itu, kami juga akan melihat tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kegiatan edukasi semacam ini di dalam lingkungan yang unik seperti lembaga pemasyarakatan.

Kegiatan ini tidak hanya penting dalam konteks kesejahteraan WBP, tetapi juga dalam upaya untuk memperkuat demokrasi dan menciptakan

masyarakat yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan memahami peran penting kegiatan edukasi ini, kita dapat berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas Pemilu dan, pada gilirannya, mendukung pembangunan negara yang lebih demokratis dan adil.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan ini dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, Banten, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, pukul 09:00 hingga 11:00 WIB melalui penerapan konsep sosialisasi. Sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan edukasi ini mengacu pada pendekatan sosiologis yang berfokus pada hakikat masyarakat dan hubungan sosial. Pendekatan yang sesuai untuk kegiatan edukasi ini adalah pendekatan edukatif dan rehabilitatif. Dalam konteks ini, pendekatan edukatif fokus pada memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada WBP tentang proses politik, hak-hak politik mereka, serta pentingnya partisipasi politik dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan rehabilitatif juga diperlukan untuk membantu narapidana mengatasi hambatan-hambatan psikologis dan sosial yang mungkin mempengaruhi partisipasi politik mereka, seperti rendahnya rasa percaya diri, rendahnya tingkat pendidikan, atau pengalaman kriminal sebelumnya. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat mempersiapkan narapidana secara efektif untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta membantu mereka menjadi anggota yang lebih produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat setelah mereka bebas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi ini berkaitan dengan mempersiapkan Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) secara mental dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik, hak-hak politik, serta pentingnya partisipasi politik dalam masyarakat (Wartoyo & Ginting, 2023). Ini bertujuan untuk memastikan bahwa WBP dapat menjadi pemilih yang terinformasi dan aktif dalam proses demokrasi, terutama dalam Pemilihan Umum (Pemilu) (Surbakti et al., 2023). Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka (Daha, 2012). Kegiatan edukasi ini juga mencakup pengembangan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang akan membantu WBP dalam berinteraksi dengan baik dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pendekatan rehabilitatif juga dimasukkan dalam kegiatan ini untuk membantu WBP mengatasi hambatan-hambatan psikologis yang mungkin mempengaruhi partisipasi politik mereka, seperti rendahnya rasa percaya diri atau pengalaman kriminal sebelumnya (Utami & Indonesia, 2017). Keseluruhan, kegiatan edukasi ini bertujuan untuk

memperkuat peran dan tanggung jawab WBP dalam menjalani masa hukuman serta ketika mereka kembali ke masyarakat.



Gambar 1. Pembukaan Sosialisasi Bersama Bapak Kalapas.

Hasil kegiatan ini mengungkapkan dampak positif yang signifikan dari kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan terhadap persiapan mental dan partisipasi politik WBP dalam Pemilu (gambar 1). Salah satu temuan utama adalah peningkatan pengetahuan politik di kalangan WBP. Melalui kegiatan edukasi, mereka telah meningkatkan pemahaman mereka tentang proses politik, hak-hak politik mereka, serta peran mereka dalam sistem demokrasi. Mereka sekarang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang calon, partai politik, dan isu-isu politik yang relevan (Sardini, 2011).



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi.

Melalui kegiatan edukasi, WBP tidak hanya meningkatkan pengetahuan politik mereka, tetapi juga mengalami pengaruh positif yang signifikan terhadap partisipasi politik mereka (gambar 2). Teramati bahwa WBP cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak pilih mereka dan berpartisipasi dalam seluruh proses politik (Pamungkas, 2009). Mereka tidak hanya memahami pentingnya hak suara mereka, tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam berperan aktif dalam membentuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Pengaruh positif ini mencakup peningkatan rasa partisipasi dan keyakinan bahwa suara mereka memiliki dampak nyata dalam proses politik (Kusumaningsih, 2017). Sebelumnya, banyak WBP mungkin merasa terpinggirkan dari proses politik dan meragukan apakah partisipasi mereka benar-benar akan membuat perbedaan. Namun, melalui

kegiatan edukasi yang berfokus pada pentingnya partisipasi politik, WBP kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana suara mereka berkontribusi pada pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat dan negara (Nasution, 1990). Selain itu, kepercayaan diri yang lebih tinggi yang diperoleh melalui kegiatan edukasi juga berperan penting dalam mendorong partisipasi politik. WBP merasa lebih yakin untuk berbicara, berdebat, dan berinteraksi dengan pemimpin dan sesama pemilih, serta yakin bahwa pandangan mereka dihargai dalam arena politik (Bukhori, 2012). Dalam konteks yang lebih luas, pengaruh positif ini memiliki implikasi positif pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dengan partisipasi politik yang lebih aktif dari WBP, proses pemilu menjadi lebih inklusif dan mewakili beragam pandangan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan representasi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, ini juga memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem politik suatu negara dan menciptakan masyarakat yang lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Marijan, 2019).

Kegiatan edukasi bukan hanya tentang peningkatan pengetahuan politik, itu juga mencakup pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. WBP tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan hak-hak politik mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah yang esensial untuk kehidupan sehari-hari (Ula, 2014). Mereka juga belajar keterampilan hidup yang mencakup pengelolaan keuangan, pencarian pekerjaan, dan perencanaan masa depan. Semua ini membantu WBP untuk lebih siap menghadapi tantangan di luar Lapas dan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan bertanggung jawab. Dengan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang mereka peroleh melalui kegiatan edukasi, WBP memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah pembebasan, serta berkontribusi positif pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Shofia, 2009).

Meskipun kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan telah membawa dampak positif yang nyata, kegiatan ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan penting yang perlu diatasi dalam mengimplementasikannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya (Ariyanti et al., 2021). Lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi kendala dalam hal anggaran dan sumber daya manusia, yang dapat mempengaruhi sejauh mana kegiatan edukasi dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, akses terhadap teknologi juga menjadi masalah. Adanya keterbatasan peralatan dan infrastruktur teknologi dalam lingkungan Lapas dapat menghambat pelaksanaan kegiatan edukasi yang bergantung pada teknologi, seperti

akses ke pembelajaran online atau sumber daya digital. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengalokasian sumber daya dan perencanaan yang cermat.

Lembaga pemasyarakatan perlu memprioritaskan pendanaan untuk kegiatan edukasi dan memastikan bahwa fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan tersedia untuk mendukung program-program ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk organisasi nirlaba dan lembaga pendidikan, dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya (Akbar, 1997). Selain itu, penting untuk mencari solusi kreatif dalam mengatasi keterbatasan teknologi. Hal ini dapat mencakup penggunaan perangkat yang lebih sederhana, seperti komputer tanpa koneksi internet, atau pendekatan lain yang tidak terlalu bergantung pada teknologi (Surbakti et al., 2023). Dalam hal ini, upaya kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pakar dalam bidang pendidikan di dalam Lapas dapat menjadi langkah yang efektif. Kesimpulannya, sementara kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki manfaat yang signifikan, tantangan yang ada harus diatasi dengan cara yang cermat dan berkelanjutan. Dengan pengalokasian sumber daya yang tepat dan solusi kreatif untuk masalah teknologi, kegiatan edukasi ini dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mempersiapkan Warga Binaan Perumahan Pemasyarakatan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

D. DISKUSI

Kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan Warga Binaan Perumahan Pemasyarakatan (WBP) secara mental dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik, hak-hak politik, serta pentingnya partisipasi politik dalam masyarakat. Ini mencakup pengembangan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang membantu WBP berinteraksi dalam masyarakat setelah pembebasan, sambil memperkuat partisipasi politik mereka (Surbakti et al., 2023). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan politik di kalangan WBP dan dampak positif yang signifikan pada partisipasi politik mereka, termasuk peningkatan rasa partisipasi dan keyakinan bahwa suara mereka memiliki dampak nyata dalam proses politik (Enggarsasi, 2013). Meskipun memiliki dampak positif, tantangan termasuk keterbatasan sumber daya dan akses terhadap teknologi di lembaga pemasyarakatan, yang memerlukan solusi kreatif dan pengalokasian sumber daya yang cermat.

Kegiatan edukasi di dalam Lapas adalah alat penting untuk mempersiapkan WBP secara mental, meningkatkan partisipasi politik mereka, dan mengembangkan keterampilan sosial. WBP yang terlibat dalam kegiatan edukasi mengalami peningkatan pengetahuan politik dan menjadi pemilih yang lebih terinformasi. Ini membantu mereka merasa

lebih percaya diri dalam berperan aktif dalam proses politik dan membentuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Namun, tantangan dalam hal sumber daya dan teknologi harus diatasi untuk memastikan efektivitas program-program ini. Dengan solusi yang tepat, kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan dapat memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi politik WBP dan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, upaya kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki dampak positif yang signifikan pada persiapan mental dan partisipasi politik WBP dalam proses demokrasi, khususnya dalam Pemilu. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan politik WBP, tetapi juga memberikan mereka keterampilan sosial yang penting untuk berinteraksi dalam masyarakat serta keterampilan hidup yang berguna setelah pembebasan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman WBP tentang proses politik dan peningkatan partisipasi politik mereka, termasuk peningkatan rasa partisipasi dan keyakinan dalam pengaruh suara mereka dalam politik. Meskipun terdapat tantangan dalam hal sumber daya dan akses teknologi, penekanan pada pendanaan yang tepat dan solusi kreatif dapat mengatasi kendala-kendala ini, menjadikan kegiatan edukasi di dalam Lapas sebagai alat yang efektif dalam memperkuat partisipasi politik dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan upaya yang sangat penting untuk mempersiapkan mental Warga Binaan Perasyarakatan (WBP) dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Pemilu adalah elemen kunci dalam menjaga kesehatan demokrasi, dan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk WBP, memiliki pengetahuan politik yang memadai serta keterampilan sosial dan hidup yang dibutuhkan untuk berkontribusi pada masyarakat setelah pembebasan mereka. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan edukasi ini memiliki dampak positif, seperti peningkatan pemahaman politik WBP dan peningkatan partisipasi politik mereka. Kegiatan ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri WBP dalam berpartisipasi dalam proses politik.

Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan akses terhadap teknologi di lembaga pemasyarakatan, pengalokasian sumber daya yang tepat dan solusi kreatif untuk masalah teknologi dapat mengatasi kendala-kendala ini. Kolaborasi dengan pihak eksternal dan lembaga pendidikan dapat mendukung upaya ini. Kesimpulannya, kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya membantu WBP dalam persiapan mental dan partisipasi politik

mereka, tetapi juga berkontribusi pada menjaga stabilitas sosial, menghormati hak asasi manusia, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Ini adalah langkah penting dalam mendukung kualitas Pemilu dan pembangunan negara yang lebih demokratis dan adil.

Untuk memperkuat keberhasilan kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan pihak eksternal. Peningkatan dukungan finansial dan sumber daya, termasuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi sukarela, perlu didorong. Peningkatan akses teknologi bagi WBP juga harus menjadi prioritas, sambil tetap mengadakan evaluasi berkala untuk memahami dampak program. Melibatkan WBP dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta menyampaikan pesan positif tentang partisipasi politik, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial, akan membantu memotivasi partisipasi aktif mereka dalam masyarakat dan demokrasi lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mempersiapkan mental WBP, meningkatkan partisipasi politik mereka, dan menjaga stabilitas sosial, hak asasi manusia, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis, mendukung kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) dan pembangunan negara yang lebih demokratis dan adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Second Chance Foundation, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, LPPM Universitas Pelita Harapan dan Bapak Wahyu Indarto, A.Md. IP., S.H., M.H. sebagai Kepala Lembaga Perasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, para Petugas Lapas dan peserta Warga Binaan Perasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A. Z. (1997). Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia. *Unisia*, 44–51.
- Ariyanti, D., Nawangsih, V., RizaAisyah, R. R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Presetyo, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(3), 219–229.
- Bukhori, B. (2012). Hubungan kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga dengan kesehatan mental narapidana. *Jurnal Ad-Din*, 4(1), 1–19.
- Daha, M. K. (2012). *Demokrasi*.
- Enggarsasi, U. (2013). Pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia. *Perspektif*, 18(3), 157–168.

- Kusumaningsih, L. P. S. (2017). Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 234–242.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana.
- Nasution, Z. (1990). Komunikasi Politik Suatu Pengantar. In *Ghalia Indonesia*.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Shofia, F. (2009). *Optimisme masa depan narapidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Surbakti, A. H., Wahyuningsih, S. K., Batubara, M. H., Ratih, R., Ginting, M. A. B., & Nurmalina, N. (2023). Edukasi dan Sosialisasi Demokrasi Dan Politik Indonesia. *JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 28–33.
- Ula, S. T. (2014). Makna hidup bagi narapidana. *Jurnal Hisbah*, 11(1), 16–35.
- Utami, P. N., & Indonesia, H. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk. E-Issn*, 2579, 8561.
- Wartoyo, F. X. (2019). The Concept And Its Implementation Of Indonesian Legislative Elections Based On The Pancasila Democracy Perspective. *Yustisia Jurnal Hukum*, 8(1), 109–118.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Money Politics Crimes in Elections from the Perspective of Dignified Justice. *SASI*, 29(2), 259–268.